



Heterogenitas Kemiskinan di Daerah dalam Era Desentralisasi

Sudarno Sumarto

Peneliti Utama, Lembaga Penelitian SMERU

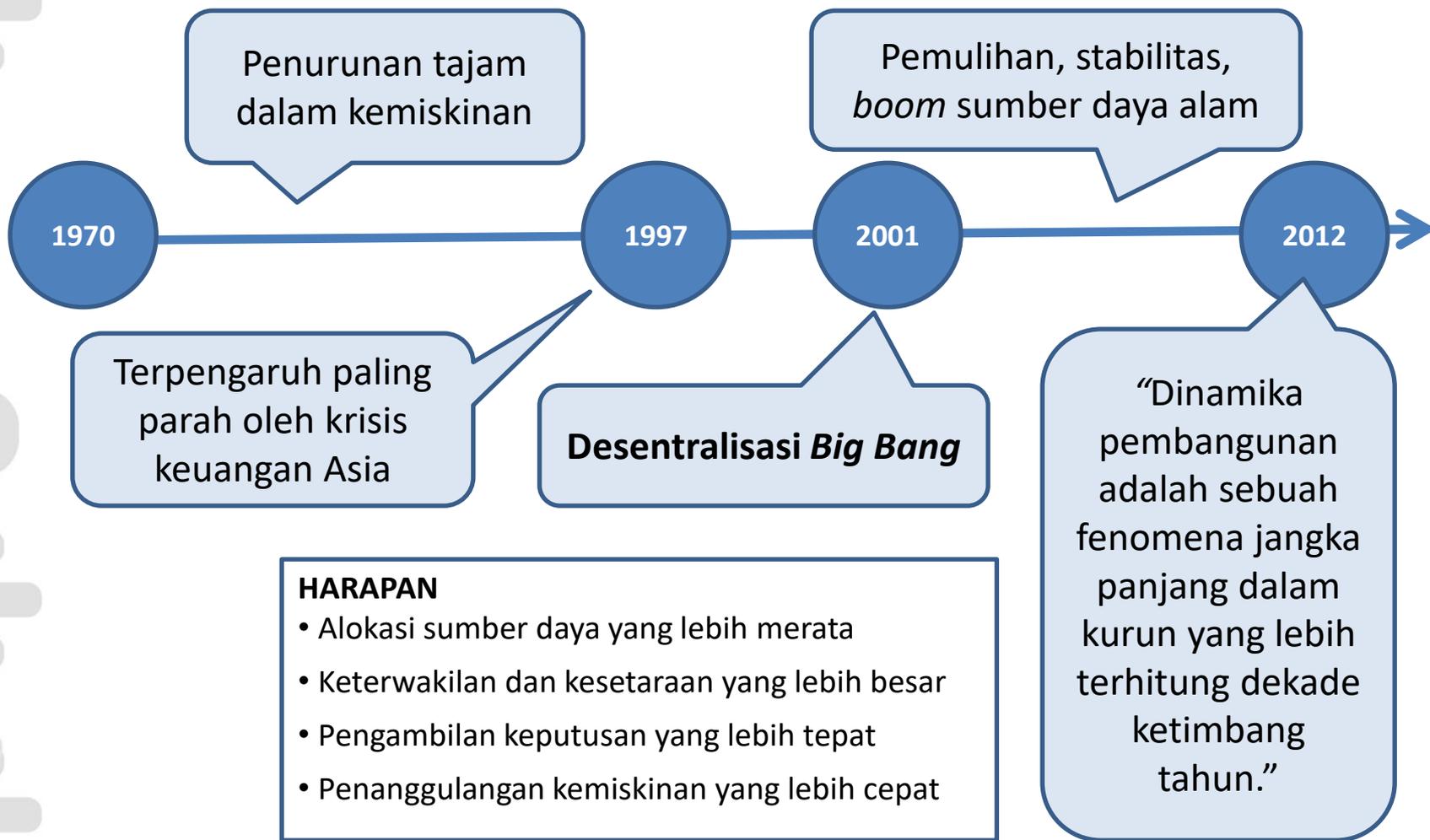
**LOKAKARYA PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**
Balai Tawang Arum - Surakarta, 29 Maret 2016

*Disusun berdasarkan kertas kerja "Explaining Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence from Decentralized Indonesia" oleh Sudarno Sumarto, Marc Vothknecht, dan Laura Wijaya (2013).





Indonesia telah Memperlihatkan Perubahan Cukup Besar dalam 20 Tahun Terakhir





Garis Besar

- Perkembangan Terkini dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
- Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah
- Analisis dan Temuan Empiris
- Kesimpulan & Tindak Lanjut Penelitian

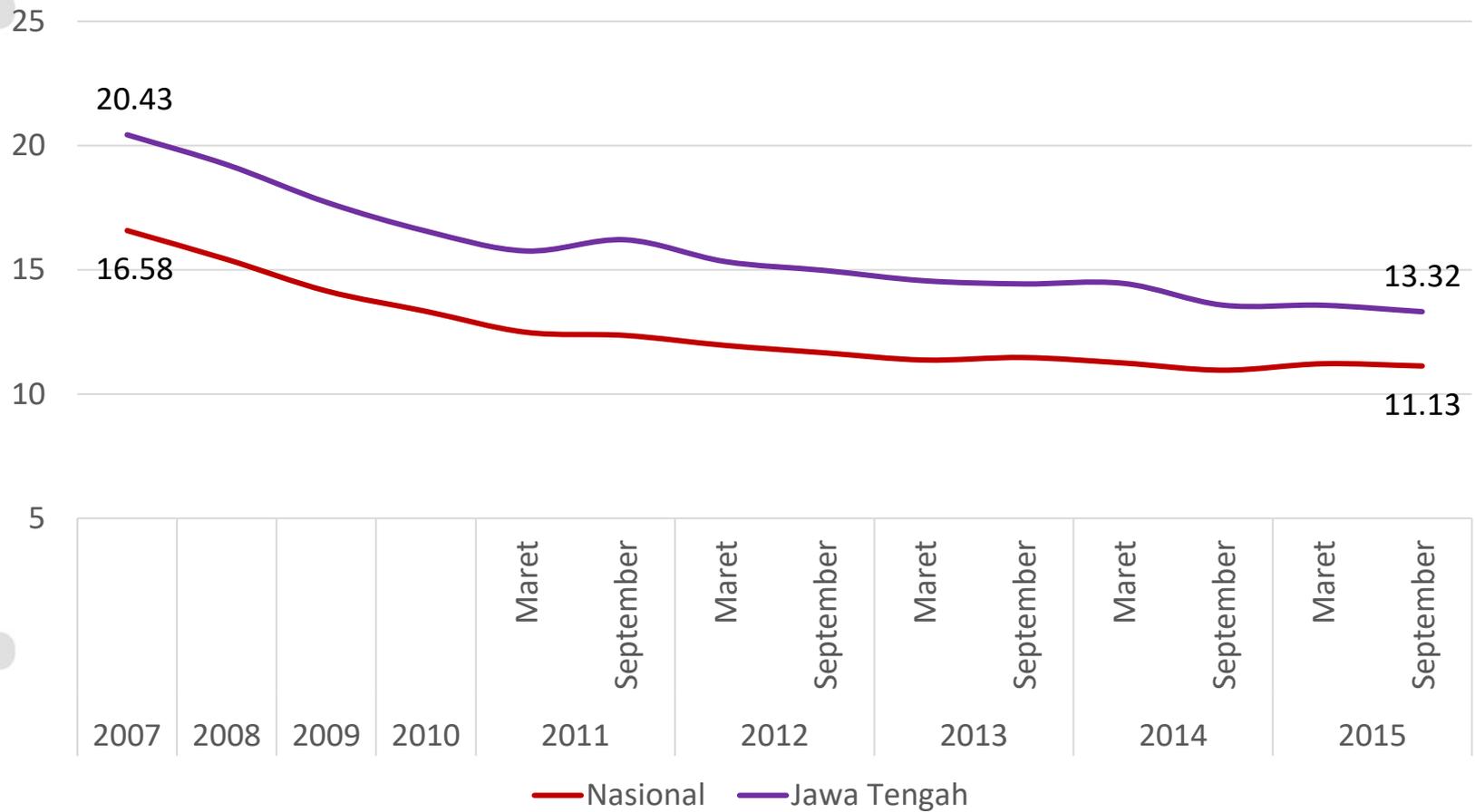


Perkembangan Terkini Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia





Tingkat Kemiskinan 2007–2015

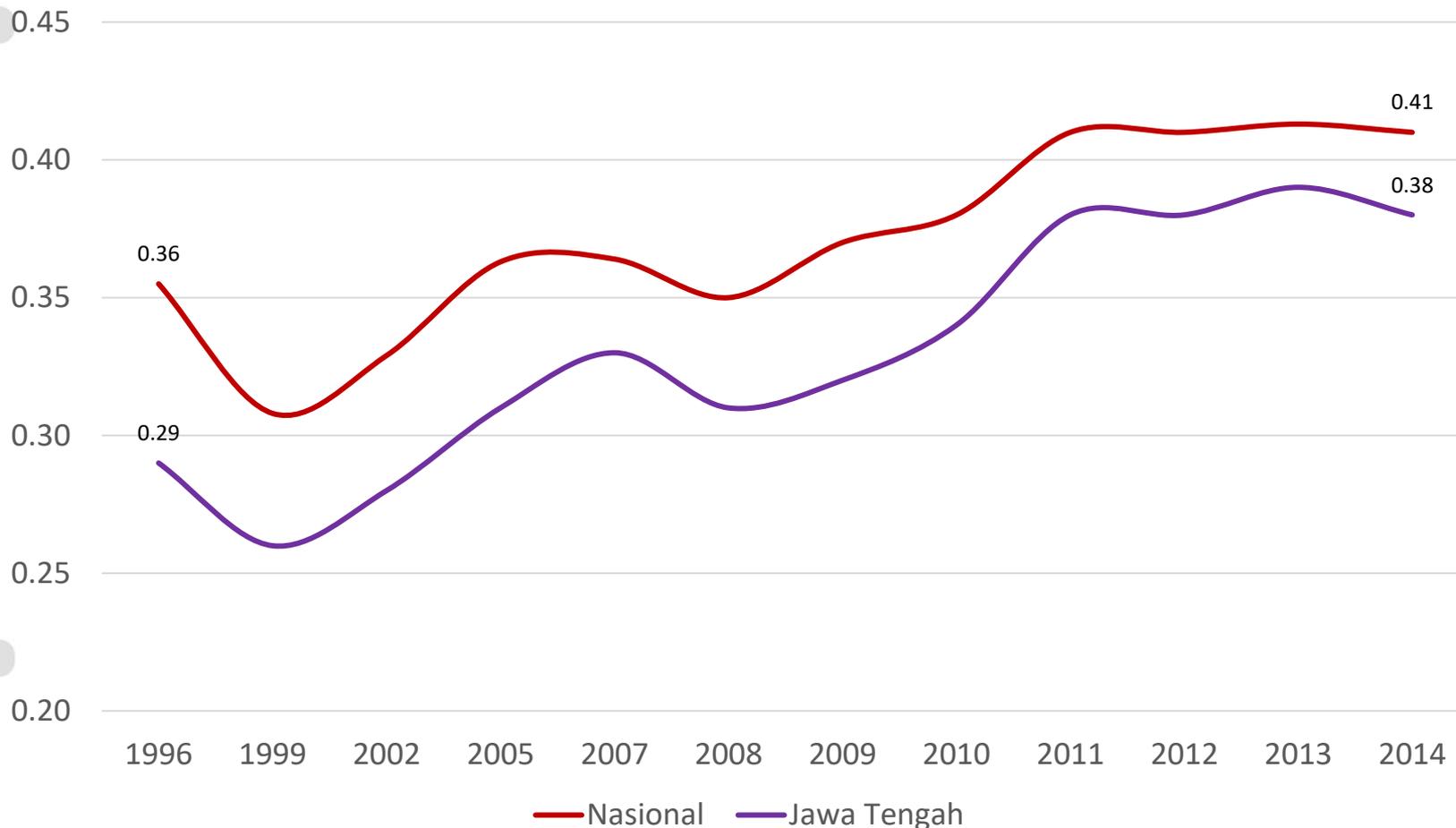


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016





Tingkat Ketimpangan 1996–2014

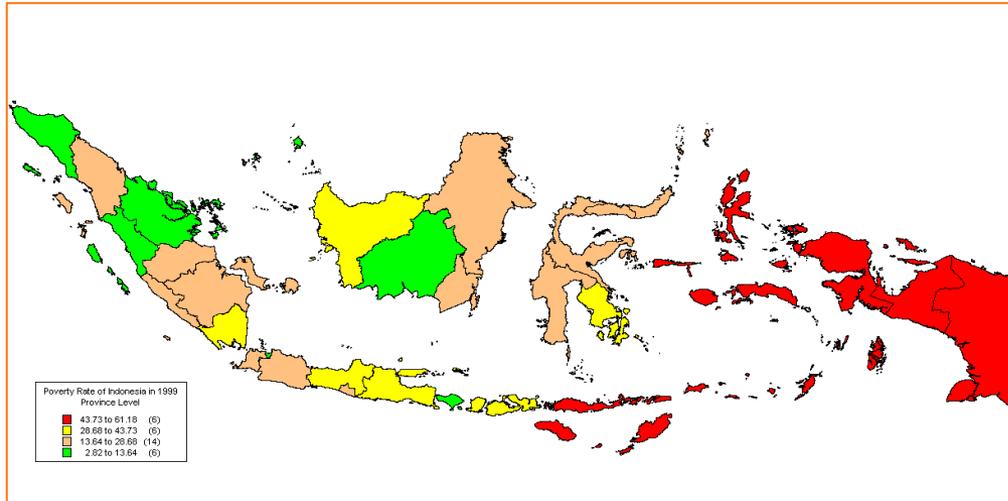


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016.

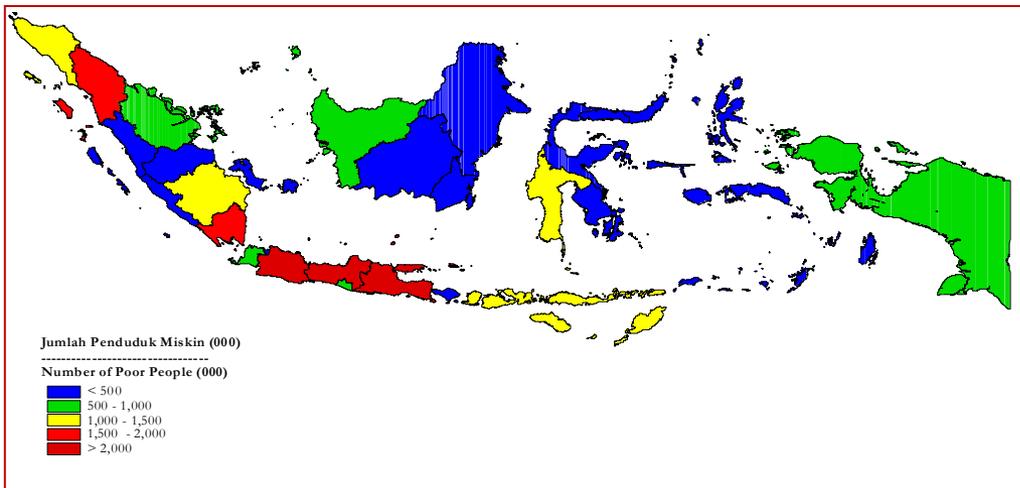




Ketimpangan Regional di Indonesia



Intensitas kemiskinan yang tinggi di pulau-pulau kawasan timur (Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara)

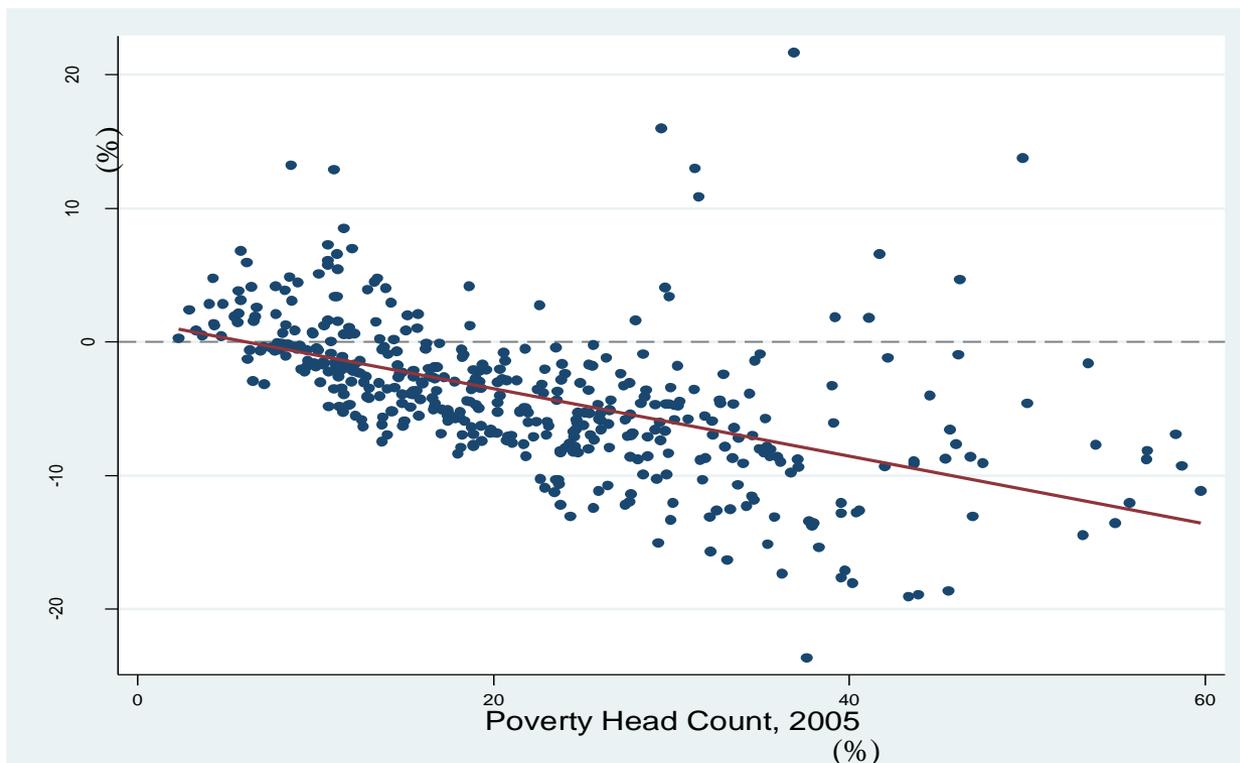


Konsentrasi penduduk miskin yang tinggi di Pulau Jawa





... dan Kabupaten/Kota Kini Mengalami Konvergensi



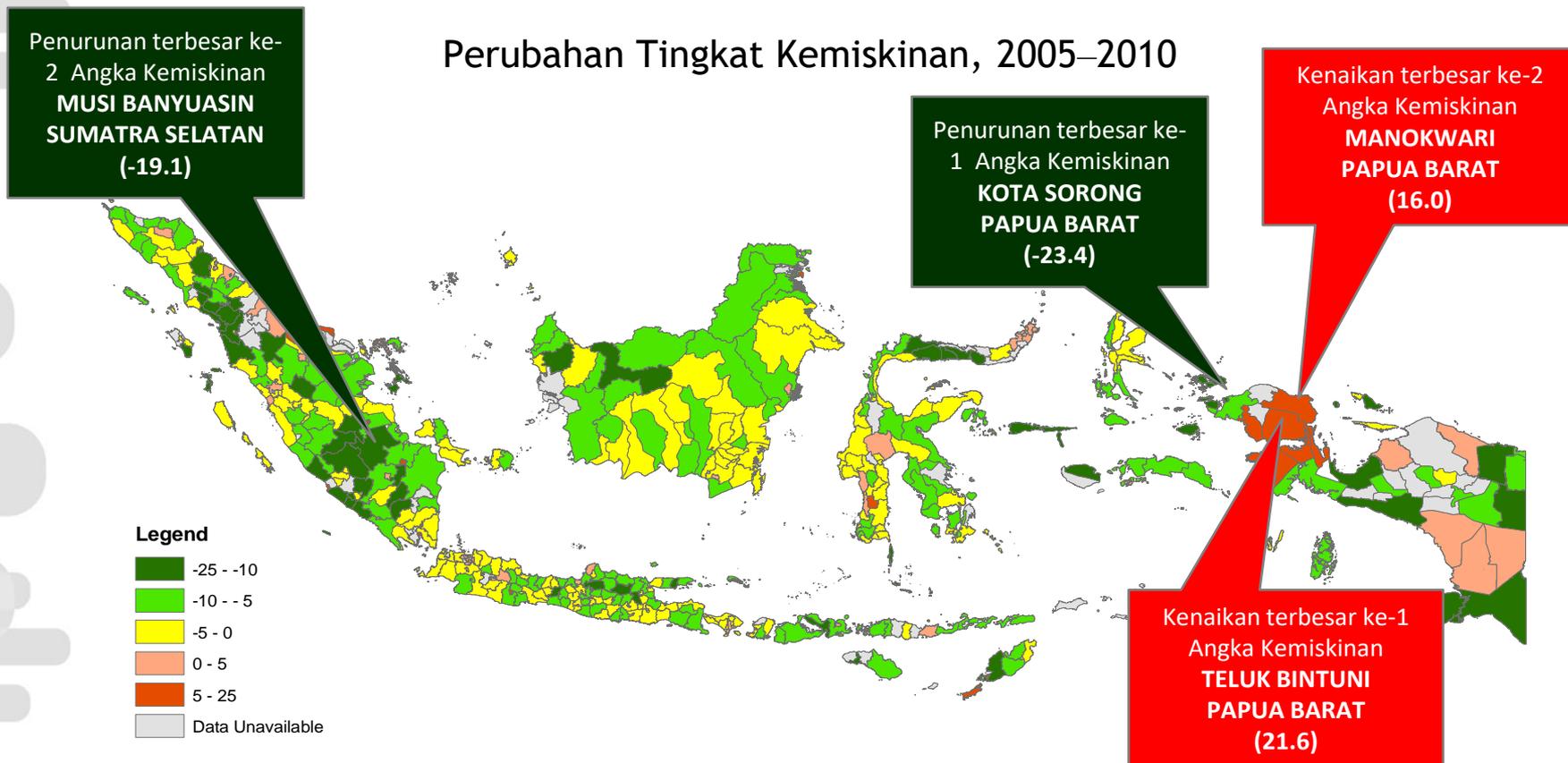
- Daerah dengan tingkat kemiskinan awal yang lebih tinggi cenderung mengalami penurunan kemiskinan yang lebih besar (-> konvergensi).
- Ada penguatan konvergensi keseluruhan dalam tingkat-tingkat kemiskinan pada level kabupaten/kota.





Namun, kemajuan ternyata tidak merata dan heterogenitas substansial tetap ada

Perubahan Tingkat Kemiskinan, 2005–2010



- Variasi substansial dalam tingkat dan tren kemiskinan baik antardaerah maupun di dalam daerah
- **Tujuan makalah ini:** menyelidiki faktor penentu (determinan) perbedaan-perbedaan yang teramati dalam kemiskinan



Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah





Kapasitas untuk Menghasilkan Pendapatan di Tingkat Daerah

- **Sumber utama pendapatan masih berupa kiriman dana dari Pemerintah Pusat**
 - Pada 2011, rata-rata 91% pendapatan kabupaten/kota berasal dari Pemerintah Pusat.
 - Selain itu, hampir 64% belanja langsung di dalam kabupaten/kota juga berasal dari Pemerintah Pusat.
- **Pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri**
 - Bukti berupa kerugian/kerusakan bagi iklim investasi dengan adanya regulasi yang kompleks dan problematis yang sering kali tumpang-tindih dengan regulasi nasional
 - Keberadaan sumber daya alam merupakan determinan kunci tentang jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan daerah.





Kinerja Pelayanan Publik

■ Kemampuan Fiskal

- Di sektor pendidikan, Kabupaten Badung (Bali) membelanjakan dana sebesar hampir 250 juta rupiah di luar dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada 2008, sedangkan kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat) mengalokasikan dana kurang dari 40 juta rupiah untuk bidang pendidikan pada tahun yang sama. Dalam hal belanja per kapita, Badung membelanjakan dana 50% lebih besar daripada Mamuju.

■ Kapasitas Teknis

- Sekitar dua pertiga desa di Indonesia, khususnya di kawasan timur, belum memiliki akses ke jaringan telekomunikasi.
- Belanja pemerintah daerah lebih banyak dilakukan untuk gaji pegawai daripada untuk layanan.
- Kurangnya akuntabilitas di tingkat daerah





Aspek-aspek Tata Kelola Desentralisasi



Mamasa: www.depkes.go.id



Papua: www.tempo.co.id

- Secara umum, desentralisasi tidak menyebabkan peningkatan signifikan dalam hal kekerasan.
- Meskipun demikian, Crisis Group (2005) mengaitkan desentralisasi administratif dengan konflik yang terjadi akibat *redistricting*.
- Dengan membagi sebuah kabupaten menjadi dua entitas atau lebih (pemekaran), daerah bisa mendapatkan peningkatan jumlah *block grant* dari Pemerintah Pusat.
- Namun, proses ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan kekerasan seperti yang terjadi di Mamasa, Papua, dan Musi Rawas.





Kapasitas Kelembagaan Kabupaten/ Kota untuk Penanggulangan Kemiskinan

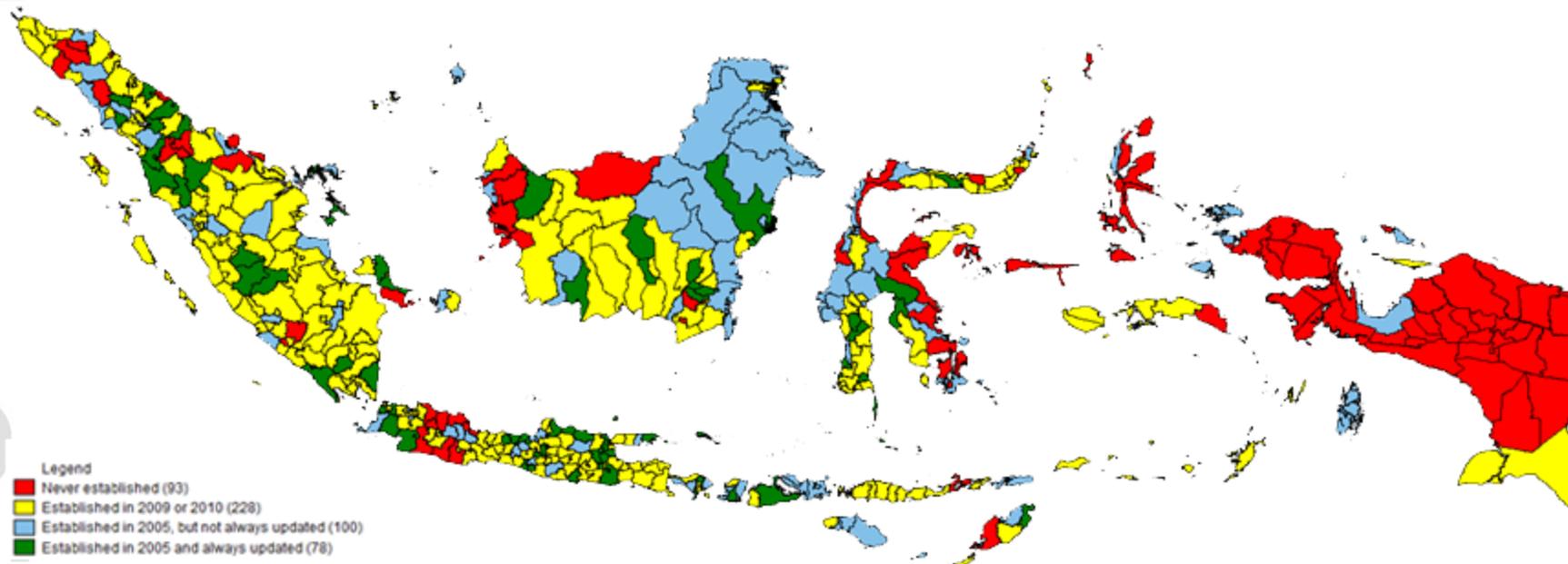
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah: mengawasi dan mengoordinasikan rancangan dan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah

- Tanggung jawab utama TKPK Daerah:
 - Pengelolaan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah
 - Pengembangan sistem informasi kemiskinan
 - Pembentukan sistem peringatan dini mengenai isu-isu kemiskinan





Pembentukan TKPK Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota



- Kurang dari 35% (175) dari kabupaten/kota yang ada telah membentuk TKPK Daerah pada akhir 2005.
- Pada 2010, sekitar 20% kabupaten belum membentuk TKPK Daerah; dari jumlah ini, hampir separuhnya berada di belahan timur Indonesia.
- Tingkat sejauh mana TKPK Daerah yang ada terlembagakan sangat bervariasi di antara berbagai kabupaten/kota.



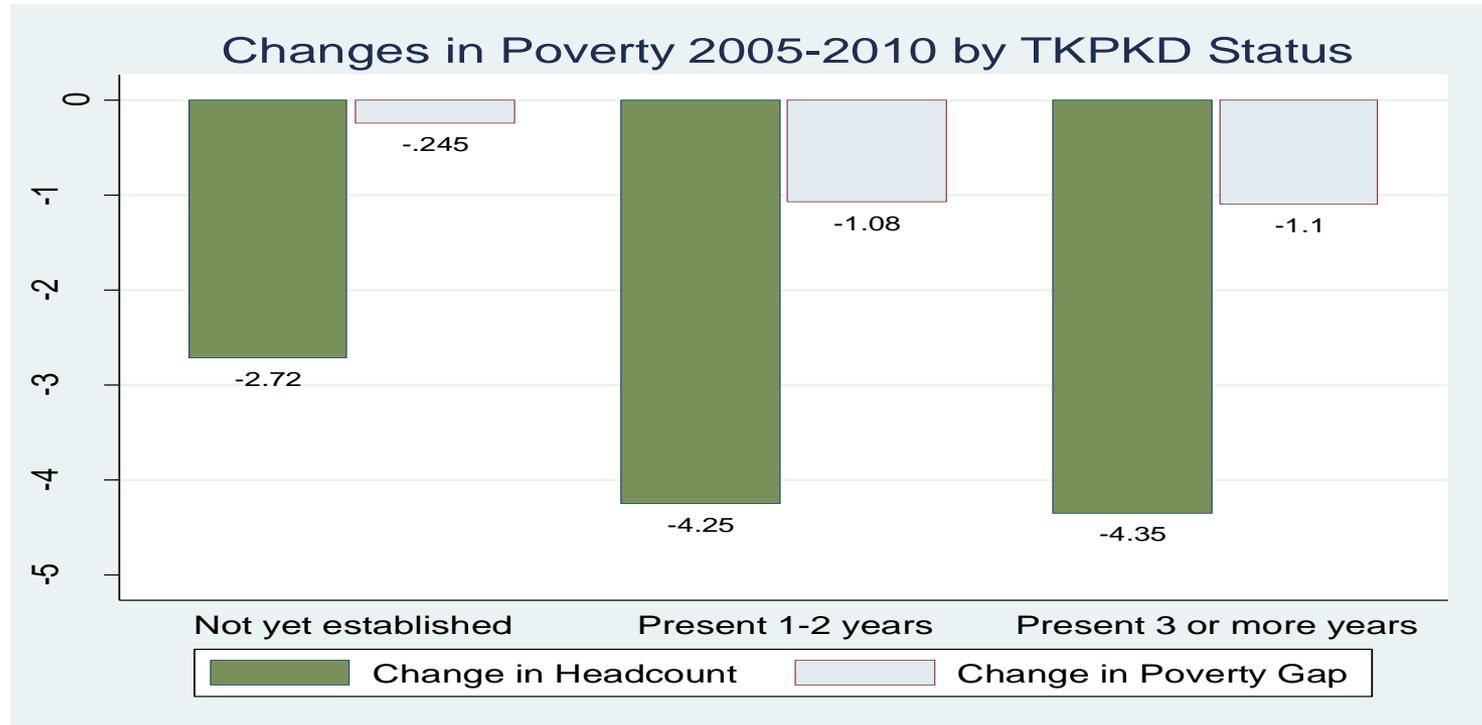


Analisis dan Temuan Empiris





Kaitan antara TKPK Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan



- Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang belum membentuk TKPK Daerah, kabupaten/kota yang telah membentuk TKPK Daerah mengurangi tingkat kemiskinan dengan skala lebih besar.
- Analisis empiris memungkinkan dipisahkannya efek TKPK Daerah dari determinan sosial-ekonomi lainnya dari kemiskinan





Ringkasan Temuan Empiris

- **Kemiskinan tampak lebih menurun pada kabupaten/kota yang memiliki:**
 - kantor lokal untuk koordinasi inisiatif-inisiatif penanggulangan kemiskinan (TKPKD);
 - porsi pendapatan fiskal yang lebih tinggi [tetapi kurang berhasil bila pendapatan fiskal merepresentasikan 50% (atau lebih) PDRB];
 - porsi pemimpin lokal berpendidikan menengah yang lebih besar;
 - capaian pendidikan rata-rata yang lebih tinggi; dan
 - porsi penduduk perkotaan yang lebih tinggi.





Kesimpulan dan Rekomendasi





Kesimpulan

- Pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan tingkat kemiskinan, dan distribusi pendapatan didapati saling terkait erat.
- Strategi pembangunan yang berhasil mensyaratkan adanya kombinasi pertumbuhan yang efektif serta spesifik daerah dan kebijakan sosial yang baik dan komprehensif.
 - Pertumbuhan ekonomi daerah yang pesat dan berkelanjutan dipandang sebagai kendaraan utama untuk penanggulangan kemiskinan.
 - Kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai merupakan prasyarat terwujudnya pelayanan publik yang efisien untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.





Rekomendasi

- Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif
- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dalam APBD
- Memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah
- Mempertahankan situasi yang kondusif di daerah



Terima Kasih



www.smeru.or.id



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



SMERU Research Institute



SMERU Research Institute





Lampiran





Pendekatan Ekonometri

- Regresi panel pada indikator kemiskinan (i) *poverty headcount* dan (ii) *poverty gap*
- Penggunaan model *random effect* (RE) dan *fixed effect* (FE) untuk mengeksploitasi dimensi longitudinal data
- Memungkinkan kontrol untuk karakteristik-karakteristik daerah/lokal yang konstan dari waktu ke waktu (sikap kultural, kondisi geografis dan iklim, dll.)
- Mengingat saling keterkaitan yang kompleks antara kemiskinan dan kondisi sosial-ekonomi lainnya, maka tidak ada klaim kausalitas
- Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling terkait dengan (penanggulangan) kemiskinan di tingkat lokal di Indonesia yang terdesentralisasi





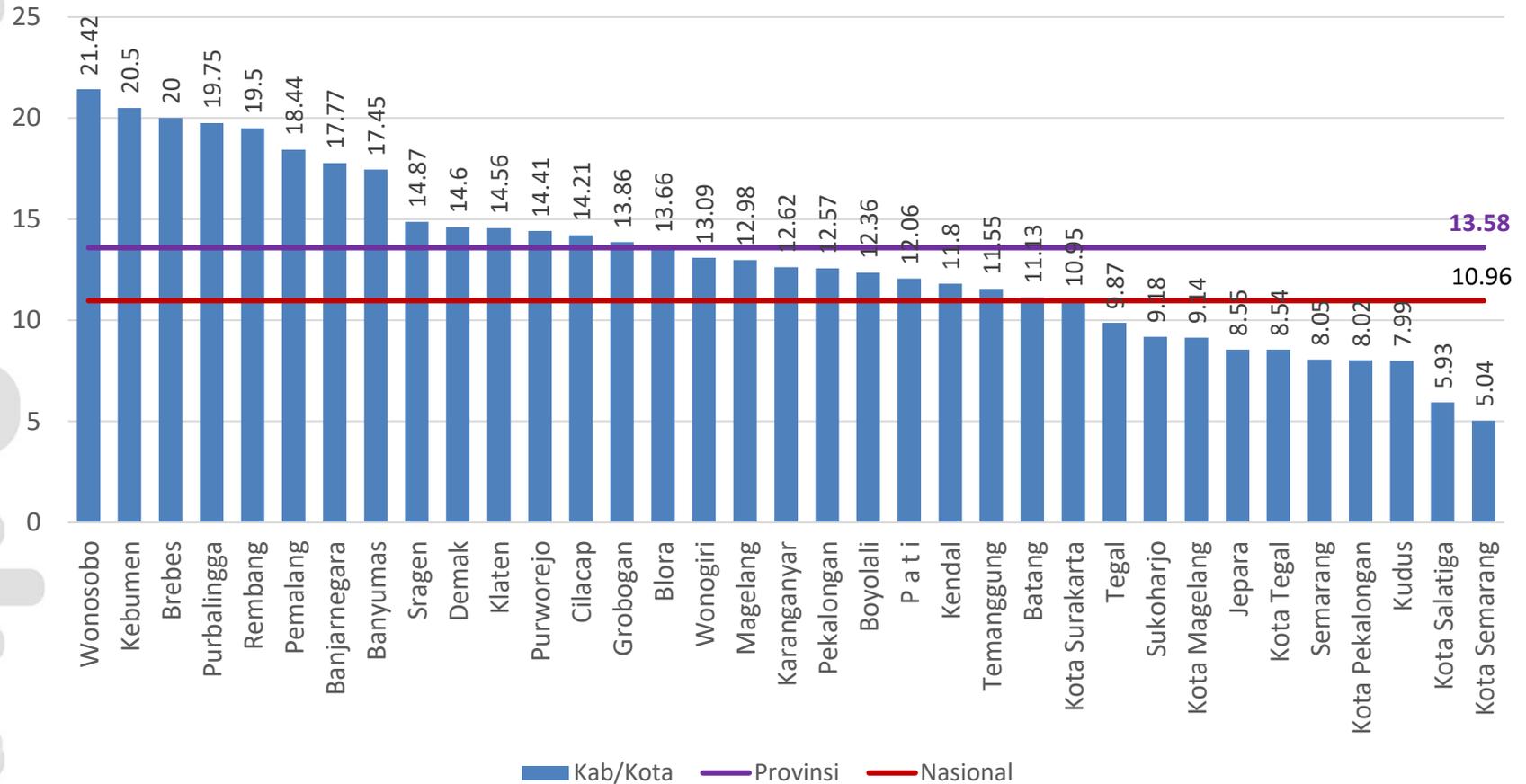
Hasil Regresi

Variabel kontrol	<i>Poverty Headcount</i>		<i>Poverty Gap</i>	
	<u>RE</u>	<u>FE</u>	<u>RE</u>	<u>FE</u>
PDB per kapita (riil, w/o pertambangan)	-0.77	-0.37	-0.06	-0.10
Penerimaan fiskal (sebagai porsi dari PDB)	-3.54***	-4.99***	-0.97***	-2.01***
Pendidikan (rata-rata lama sekolah dalam tahun)	-2.03***	-1.99***	-0.34***	-0.33***
Pendidikan kepala desa (tidak sampai pendidikan menengah)	7.77***	6.56**	1.15	-0.49
Populasi perkotaan (porsi dari jumlah penduduk)	-4.30		-1.29*	
TKPKD: aktif selama 1–2 tahun	-1.13***	-1.35***	-0.16**	-0.32***
TKPKD: aktif selama lebih dari 3 tahun	-3.43***	-3.79***	-0.66***	-0.92***
Ketimpangan: Koefisien Gini	0.04	0.03	0.07***	0.06***
Riwayat kekerasan berskala besar akhir-akhir ini	4.44***		1.05***	
Jumlah pengamatan	2598	2598	2598	2598
Pseudo-R²	0.309	0.314	0.128	0.145





Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014



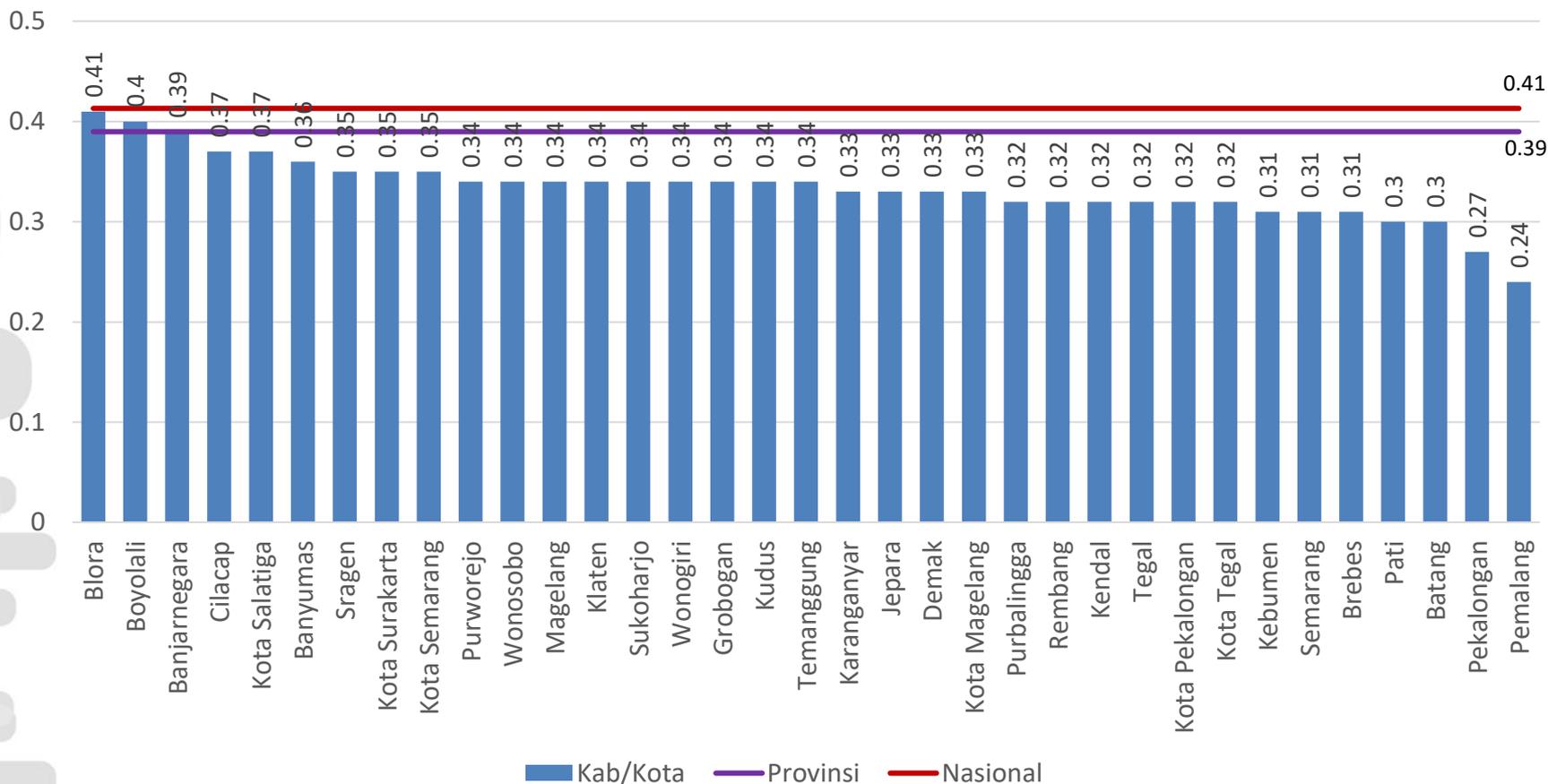
Sumber: BPS, 2015.





Tingkat Ketimpangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014

Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota, 2013



Sumber: BPS, 2014

